RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

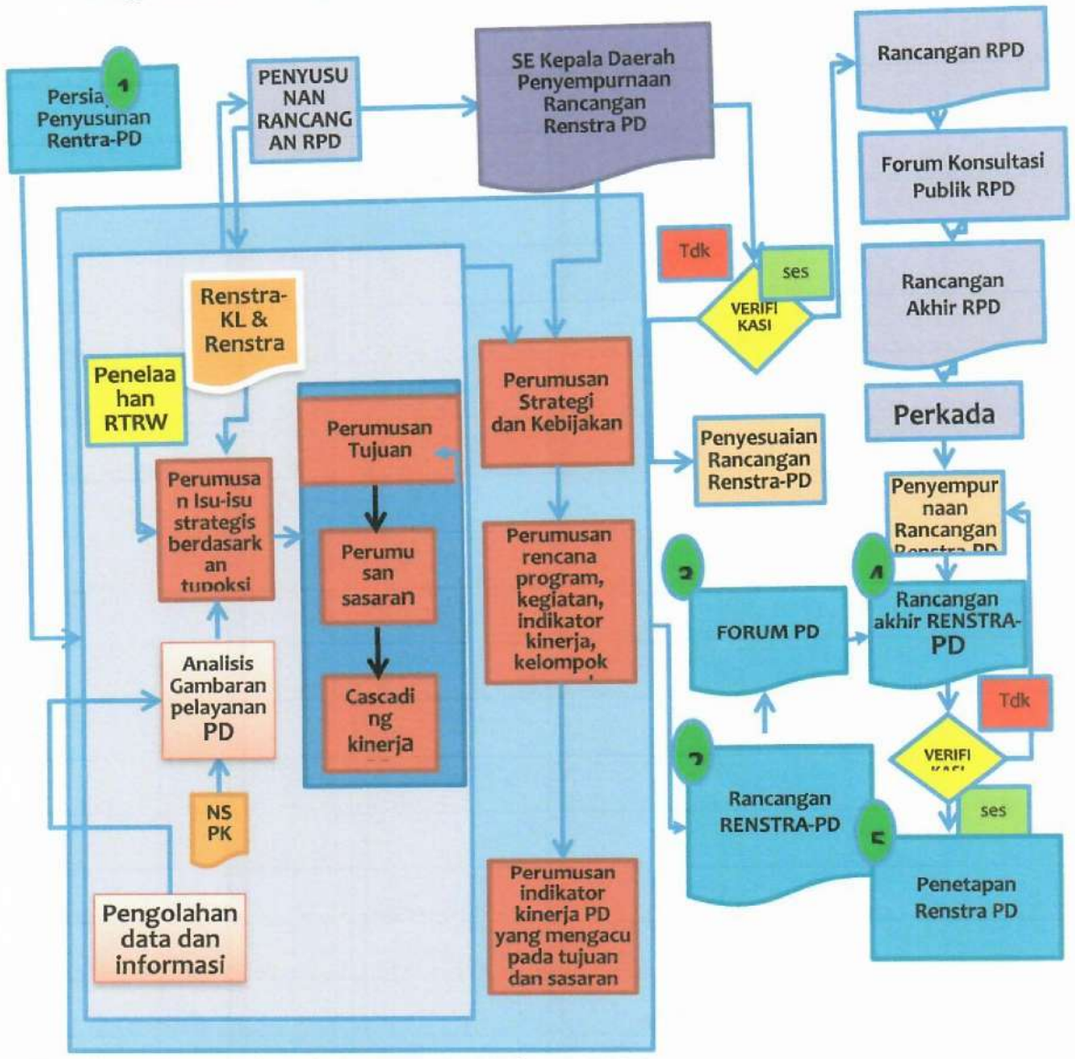
Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian

hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra

PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo;
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo;
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo;
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo;
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo;
4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
6.2. Rencana Pendanaan Indikatif Proyek Prioritas dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kominfo.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, *Good Governance* tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu, semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Governance* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance melalui electronic government (e-government),* pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengelolaan dan pengembangan statistik sektoral.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

I. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik.

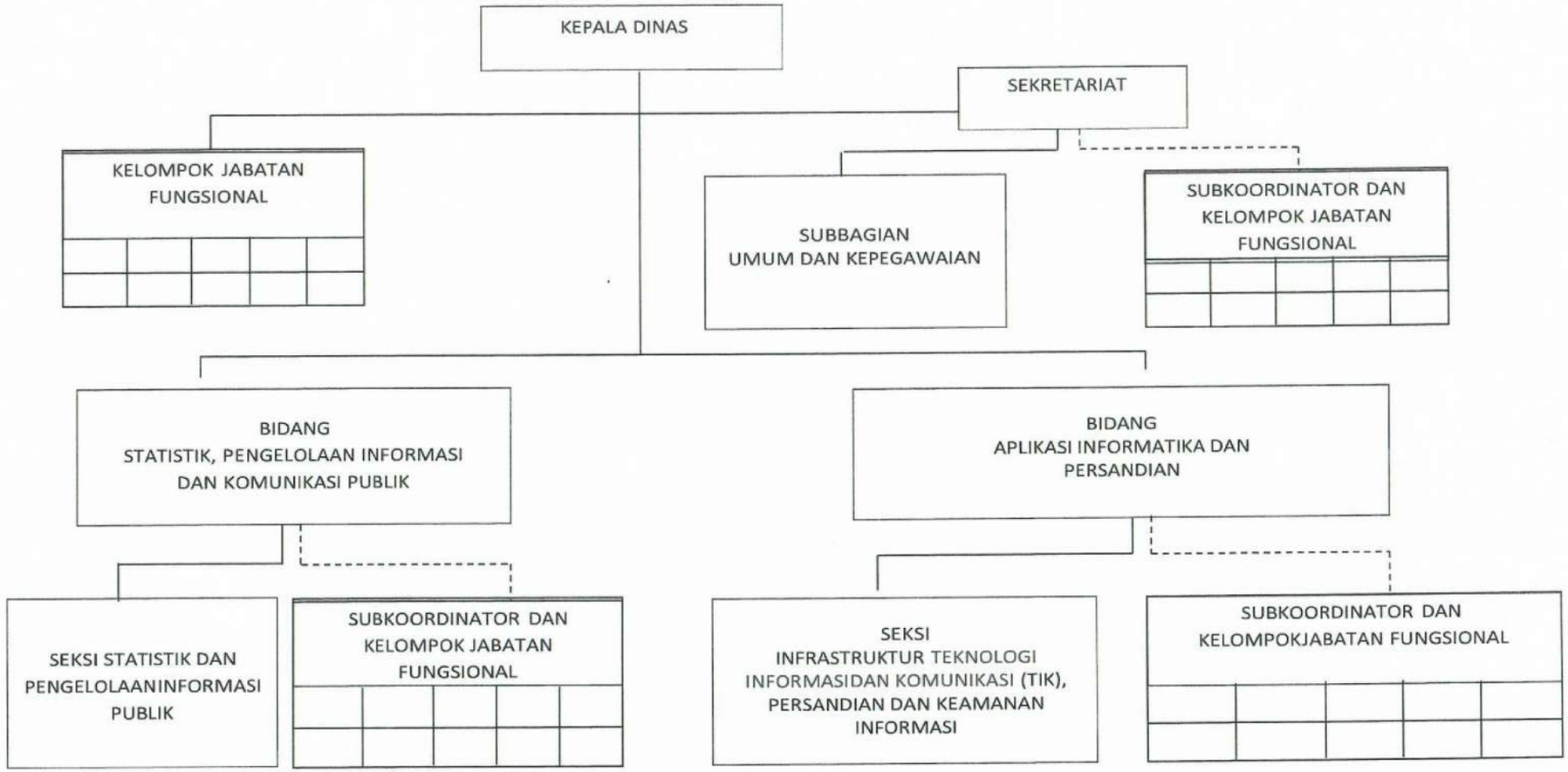
II. Fungsi

Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai fungsi:

a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
e) pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
f) pengelolaan dan pengembangan *e-government* dan *smart city*;
g) pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
h) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi sebagaimana tabel di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk saat ini berkedudukan Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2022 didukung oleh 79 (tujuh puluh sembilan) orang pegawai/karyawan yang terdiri 21 (duapuluh satu) orang PNS dan 58 (lima puluh delapan) orang karyawan dengan status tenaga kontrak. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, dilakukan pembagian tugas bagi Pejabat Eselon, sesuai dengan Lampiran XIV.2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Pendidikan, Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan, Urusan, Lulusan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S-2	2 orang	
2.	S-1	13 orang	
3.	D-4	1 orang	
4.	D-3	2 orang	
5.	SLTA	2 orang	
6.	SMP	1 Orang	
	Jumlah	**21 orang**	

Tabel 2.2.2
Data Pegawai Menurut Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	3 orang	
2.	Golongan III	13 orang	
3.	Golongan II	4 orang	
4.	Golongan I	1 orang	
	Jumlah	**21 orang**	

Tabel 2.2.3
Data Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural	5 orang	
2.	Fungsional Tertentu	9 orang	
3.	Fungsional Pelaksana	7 Orang	
	Jumlah	**21 orang**	

Tabel 2.2.4
Data Pegawai berdasarkan Urusan

No	Urusan	Jumlah	Ket
1.	Sekretariat	4 Orang	
2.	Komunikasi dan Informatika	14 orang	
3.	Statistik	2 orang	
4.	Persandian	1 orang	
	Jumlah	**21 orang**	

Tabel 2.2.5
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 Yang Lulusan IT

No	LULUSAN	Jumlah	Ket
	PNS		
1.	Sarjana Komunikasi dan Informatika dan serumpun	8 orang	
2.	Sarjana Non Komunikasi dan Informatika	10 orang	
	Jumlah	**18 orang**	
	Non PNS		
1.	Sarjana Komunikasi dan Informatika dan serumpun	13 orang	
2.	Sarjana Non Komunikasi dan Informatika	32 orang	
	Jumlah	**45 orang**	

2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sedangkan bila ditinjau dari aspek sarana dan prasarana untuk mendukung Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Kegiatan Komunikasi dan Informatika, fasilitas yang dimiliki sebagaimana berikut :

1. Kendaraan Bermotor.
   a. Mobil Dinas = 4 buah
   b. Mobil Operasional = 2 buah
   c. Roda 2 Operasional = 3 buah
2. Gedung Kantor
   a. Ruang Kepala Dinas
   b. Ruang Sekretaris
   c. Ruang Kepala Bidang
   d. Ruang Rapat
   e. Ruang Sekretariat dan Bidang-bidang
   f. Ruang Data Center
   g. Ruang Studio RSAL FM
   h. Command Center
   i. Mushola
3. Komputer
   a. Komputer PC = 60 buah
   b. Laptop = 19 buah
   c. Printer = 21 buah
   d. Scanner = 3 buah
4. Jaringan Komputer
   a. Internet

      Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan PT. Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk koneksi regular *downstream* berupa paket Indihome sebesar 140 mbps (2 line) dan untuk *backup connection* internet dedicated Astinet dengan bandwidth 120 mbps dan Indosat sebesar 250 mbps.

      Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan jaringan seluruh perangkat daerah, dengan bekerjasama dengan PT Skyline Semesta dengan *internet connection* kategori akses internasional dengan besaran bandwidth 1024 mbps.

      Jalur internet dan intranet ada di masing-masing

Organisasi Perangkat Daerah, terhubung dengan akses VPN Fiber Optik dengan alokasi besaran bandwidth masing-masing 10 mbps. Sistem informasi kesehatan juga terhubung ke 20 puskesmas, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PT Lintas Data Prima, sedangkan untuk akses SIMDA Keuangan dan Sistem Informasi Aset (SIMASET) dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

b. *Hotspot* tempat publik

Titik point *Hotspot free* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi ada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan untuk tempat publik ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Alun-Alun Nganjuk dan kawasan wisata kota Slumbung di Jalan Ahmad Yani.

5. *Hardware*

a. Access Point

Dinas Komunikasi dan Informatika menempatkan *access point* di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan untuk masing-masing Perangkat Daerah penempatan dan pengelolaan *access point* yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

b. Router

Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 285 (dua ratus delapan puluh lima) buah *Router* Mikrotik untuk pengelolaan data centre, LPSE Kabupaten Nganjuk dan internet di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Switch/ Switch HUB

Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat jaringan komputer, disediakan *Switch* yang menghubungkan beberapa perangkat di Dinas Komunikasi dan Informatika.

d. *Network Tool Kit*

Untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan komputer, didukung dengan peralatan jaringan antara lain: Tang *Cramping Tool* 3 unit, kabel tester UTP 2 unit, cable UTP 1 rol dan Konektor RG45 1 box.

e. *Server*

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 27 unit *server* yang dipergunakan untuk aplikasi e-government di Pemerintah Kabupaten Nganjuk termasuk untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

f. *CCTV*

Kamera dan alat perekamnya dipergunakan untuk pemantauan situasi sekitar Sekretriat Daerah Kabupaten Nganjuk yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan di sekitar area Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang berjumlah 101 unit. CCTV juga dibangun di jalan-jalan utama Kabupaten Nganjuk untuk memantau lalulintas dan keamanan terhubung dengan Comand Center dan Kepolisian Resort Nganjuk.

6. Aplikasi (Perangkat Lunak)

a. Sistem operasi (Windows, Linux)

Sistem operasi yang digunakan untuk komputer pengguna sehari-hari adalah Microsoft Windows sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi variantnya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan data akan diterapkan *free open souce system*. Hal ini sesuai dengan semangat himbauan kementerian pendayagunaan aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau *open source.*

b. Anti Virus

Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat pembaruan dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna internet dapat melakukan pembaruan antivirus yang dimiliki. Seluruh perangkat komputer di lingkup Pemerintah telah mengimplementasikan pengamanan dengan anti virus.

7. Media komunikasi

Untuk menjalankan fungsi sebagai komunikator pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola sarana media komunikasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk meliputi:

a. Media penyiaran

Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola media penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu Radio Suara Ajuk Ladang (RSAL) melalui siaran frekuensi FM 105,3 FM dan siaran streaming internet.

b. Media daring

1) Portal utama Pemerintah Kabupaten yang dinamakan Portal Informasi Nganjuk (PING) dengan alamat http://www.nganjukkab.go.id. memproduksi informasi sebanyak 11 konten tiap hari berupa konten artikel, berita foto, berita video.

Seluruh 52 portal Perangkat Daerah serta 264 portal desa dan 20 portal kelurahan telah terintegrasi dengan portal PING, membentuk jejaring informasi yang disebut Jejaring Informasi Anjuk Ladang (JIAL). Keseluruhan media komunikasi yang tercantum dalam daftar sebagai berikut:

No	Instansi	Alamat Portal
1	Pemkab Nganjuk	https://www.nganjukkab.go.id
2	Inspektorat Daerah	https://inspektorat.nganjukkab.go.id
3	Sekretariat DPRD	https://www.dprdnganjukkab.go.id
4	BAPPEDA	https://bappeda.nganjukkab.go.id
5	BPKAD	http://bpkad.nganjukkab.go.id
6	BAPENDA	https://bapenda.nganjukkab.go.id
7	BKPSDM	https://bkd.nganjukkab.go.id
8	BPBD	http://bpbd.nganjukkab.go.id
9	Dinas Pendidikan	http://dispendik.nganjukkab.go.id
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	https://disporabudpar.nganjukkab.go.id
11	Dinas Kesehatan	https://dinkes.nganjukkab.go.id
12	Dinas Sosial dan PPPA	http://dinsospppa.nganjukkab.go.id

13	Dinas PPKB	http://dppkb.nganjukkab.go.id
14	Dinas PMD	http://pmd.nganjukkab.go.id
15	Dinas P M P T S P	https://dpmptsp.nganjukkab.go.id
16	Disperindag	http://indag.nganjukkab.go.id
17	Dinas Tenaga Kerja	http://disnaker.nganjukkab.go.id
18	Diskominfo	https://diskominfo.nganjukkab.go.id
19	Dinas PUPR	http://pupr.nganjukkab.go.id
20	Dishub	http://dishub.nganjukkab.go.id
21	Dinas PRKPP	http://prkpp.nganjukkab.go.id
22	Dinas LH	http://dlh.nganjukkab.go.id
23	Dinas Pertanian	http://disperta.nganjukkab.go.id
24	Dispendukcapil	https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id
25	Dinas KPP	http://kpp.nganjukkab.go.id
26	Dinas ARPUS	http://arpus.nganjukkab.go.id
27	SatPol PP	http://polpp.nganjukkab.go.id
28	RSUD Nganjuk	https://rsud.nganjukkab.go.id
29	RSUD Kertosono	https://rsudkertosono.nganjukkab.go.id
30	Kecamatan Bagor	https://bagor.nganjukkab.go.id
31	Kecamatan Baron	https://baron.nganjukkab.go.id
32	Kec. Berbek	https://berbek.nganjukkab.go.id
33	Kec. Gondang	http://gondang.nganjukkab.go.id
34	Kec. Jatikalen	http://jatikalen.nganjukkab.go.id
35	Kec. Kertosono	http://kertosono.nganjukkab.go.id
36	Kec. Lengkong	https://lengkong.nganjukkab.go.id
37	Kec. Loceret	https://loceret.nganjukkab.go.id
38	Kec. Nganjuk	http://nganjuk.nganjukkab.go.id
39	Kec. Ngetos	http://ngetos.nganjukkab.go.id
40	Kec. Ngluyu	http://ngluyu.nganjukkab.go.id
41	Kec. Ngronggot	http://ngronggot.nganjukkab.go.id
42	Kec. Pace	http://pace.nganjukkab.go.id
43	Kec. Patianrowo	http://patianrowo.nganjukkab.go.id
44	Kec. Prambon	http://prambon.nganjukkab.go.id
45	Kec. Rejoso	http://rejoso.nganjukkab.go.id
46	Kec. Sawahan	http://sawahan.nganjukkab.go.id
47	Kec. Sukomoro	http://sukomoro.nganjukkab.go.id
48	Kec.Tanjunganom	http://tanjunganom.nganjukkab.go.id
49	Kec. Wilangan	http://wilangan.nganjukkab.go.id
50	Desa Bareng	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/bareng
51	Desa Bendolo	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/bendolo

52	Desa Duren	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/duren
53	Desa Kebonagung	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/kebonagung
54	Desa Margopatut	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/margopatut
55	Desa Ngliman	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/ngliman
56	Desa Sawahan	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/sawahan
57	Desa Sidorejo	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/sidorejo
58	Desa Siwalan	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/siwalan
59	Desa Blongko	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/blongko
60	Desa Kepel	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/kepel
61	Desa Klodan	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/klodan
62	Desa Kuncir	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/kuncir
63	Desa Kweden	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/kweden
64	Desa Mojoduwur	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/mojoduwur
65	Desa Ngetos	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/ngetos
66	Desa Oro-Oro Ombo	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/oro-oroombo
67	Desa Suru	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/suru
68	Desa Balongrejo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/balongrejo
69	Desa Bendungrejo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/bendungrejo
70	Desa Berbek	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/berbek
71	Desa Bulu	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/bulu
72	Desa Cepoko	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/cepoko
73	Desa Grojogan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/grojogan
74	Desa Kacangan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/kacangan
75	Desa Maguan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/maguan
76	Desa Mlilir	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/mlilir
77	Desa Ngrawan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/ngrawan
78	Desa Patranrejo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/patranrejo
79	Desa Salamrojo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/salamrojo
80	Desa Semare	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/semare
81	Desa Sendangbumen	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sendangbumen
82	Desa Sengkut	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sengkut
83	Desa Sonopatik	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sonopatik
84	Desa Sumberurip	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sumberurip
85	Desa Sumberwindu	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sumberwindu
86	Desa Tiripan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/tiripan
87	Desa Bajulan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/bajulan
88	Desa Candirejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/candirejo
89	Desa Gejagan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/gejagan

90	Desa Genjeng	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/genjeng
91	Desa Godean	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/godean
92	Desa Jatirejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/jatirejo
93	Desa Karangsono	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/karangsono
94	Desa Kenep	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/kenep
95	Desa Kwagean	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/kwagean
96	Desa Loceret	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/loceret
97	Desa Macanan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/macanan
98	Desa Mungkung	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/mungkung
99	Desa Ngepeh	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/ngepeh
100	Desa Nglaban	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/nglaban
101	Desa Patihan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/patihan
102	Desa Putukrejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/putukrejo
103	Desa Sekaran	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/sekaran
104	Desa Sombron	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/sombron
105	Desa Sukorejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/sukorejo
106	Desa Tanjungrejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/tanjungrejo
107	Desa Tekenglagahan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/tekenglagahan
108	Desa Tempelwetan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/tempelwetan
109	Desa Babadan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/babadan
110	Desa Banaran	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/banaran
111	Desa Batembat	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/batembat
112	Desa Bodor	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/bodor
113	Desa Cerme	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/cerme
114	Desa Gemenggeng	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/gemenggeng
115	Desa Gondang	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/gondang
116	Desa Jampes	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/jampes
117	Desa Jatigreges	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/jatigreges
118	Desa Jetis	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/jetis
119	Desa Joho	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/joho
120	Desa Kecubung	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/kecubung
121	Desa Kepanjen	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/kepanjen
122	Desa Mlandangan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/mlandangan
123	Desa Pacekulon	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/pacekulon
124	Desa Pacewetan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/pacewetan
125	Desa Plosoharjo	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/plosoharjo
126	Desa Sanan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/sanan
127	Desa Baleturi	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/baleturi

128	Desa Bandung	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/bandung
129	Desa Gondanglegi	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/gondanglegi
130	Desa Kurungrejo	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/kurungrejo
131	Desa Mojoagung	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/mojoagung
132	Desa Nglawak	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/nglawak
133	Desa Rowoharjo	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/rowoharjo
134	Desa Sanggrahan	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/sanggrahan
135	Desa Singkalanyar	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/singkalanyar
136	Desa Sonoageng	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/sonoageng
137	Desa Sugihwaras	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/sugihwaras
138	Desa Tanjungtani	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/tanjungtani
139	Desa Tegaron	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/tegaron
140	Desa Watudandang	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/watudandang
141	Desa Banjarsari	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/banjarsari
142	Desa Betet	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/Betet
143	Desa Cengkok	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/cengkok
144	Desa Dadapan	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/dadapan
145	Desa Juwet	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/juwet
146	Desa Kalianyar	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/kalianyar
147	Desa Kaloran	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/kaloran
148	Desa Kelutan	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/kelutan
149	Desa Klurahan	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/klurahan
150	Desa Mojokendil	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/mojokendil
151	Desa Ngronggot	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/ngronggot
152	Desa Tanjungkalang	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/tanjungkalang
153	Desa Trayang	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/trayang
154	Kelurahan Banaran	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/banaran
155	Desa Bangsri	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/bangsri
156	Desa Drenges	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/drenges
157	Desa Juwono	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/juwono
158	Desa Kalianyar	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kalianyar
159	Desa Kepuh	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kepuh
160	Desa Kudu	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kudu
161	Desa Kutorejo	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kutorejo
162	Desa Lambangkuning	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/lembangkuning
163	Desa Nglawak	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/nglawak
164	Desa Pandantoyo	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/pandantoyo

165	Desa Pelem	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/pelem
166	Desa Tanjung	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/tanjung
167	Desa Tembarak	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/tembarak
168	Desa Babadan	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/babadan
169	Desa Bukur	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/bukur
170	Desa Lestari	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/lestari
171	Desa Ngepung	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/ngepung
172	Desa Ngrombot	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/ngrombot
173	Desa Pakuncen	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/pakuncen
174	Desa Patianrowo	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/patianrowo
175	Desa Pecuk	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/pecuk
176	Desa Pisang	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/pisang
177	Desa Rowomarto	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/rowomarto
178	Desa Tirtobinangun	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/tirtobinangun
179	Desa Baron	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/baron
180	Desa Garu	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/garu
181	Desa Gebangkerep	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/gebangkerep
182	Desa Jambi	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/jambi
183	Desa Jekek	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/jekek
184	Desa Katerban	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/katerban
185	Desa Kemaduh	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/kemaduh
186	Desa Kemlokolegi	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/kemlokolegi
187	Desa Mabung	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/mabung
188	Desa Sambiroto	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/sambiroto
189	Desa Waung	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/waung
190	Kelurahan Tanjunganom	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/tanjunganom
191	Kelurahan Warujayeng	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/warujayeng
192	Desa Banjaranyar	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/banjaranyar
193	Desa Demangan	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/demangan
194	Desa Getas	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/getas
195	Desa Jogomerto	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/jogomerto
196	Desa Kampungbaru	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/kampungbaru
197	Desa Kedungombo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/kedungombo
198	Desa Kedungrejo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/kedungrejo
199	Desa Malangsari	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/malangsari
200	Desa Ngadirejo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/ngadirejo
201	Desa Sambirejo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sambirejo

202	Desa Sidoharjo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sidoharjo
203	Desa Sonobekel	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sonobekel
204	Desa Sumberkepuh	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sumberkepuh
205	Desa Wates	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/wates
206	Kelurahan Kapas	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/kapas
207	Kelurahan Sukomoro	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/sukomoro
208	Desa Bagorwetan	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/bagorwetan
209	Desa Blitaran	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/blitaran
210	Desa Bungur	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/bungur
211	Desa Kedungsoko	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/kedungsoko
212	Desa Nglundo	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/nglundo
213	Desa Ngrami	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/ngrami
214	Desa Ngrengket	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/ngrengket
215	Desa Pehserut	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/pehserut
216	Desa Putren	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/putren
217	Desa Sumengko	http://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/sumengko
218	Kelurahan Begadung	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/begadung
219	Kelurahan Bogo	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/bogo
220	Kelurahan Cangkringan	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/cangkringan
221	Kelurahan Ganungkidul	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/ganungkidul
222	Kelurahan Jatirejo	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/jatirejo
223	Kelurahan Kartoharjo	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kartoharjo
224	Kelurahan Kauman	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kauman
225	Kelurahan Kramat	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kramat
226	Kelurahan Mangundikaran	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/mangundikaran
227	Kelurahan Payaman	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/payaman
228	Kelurahan Ploso	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/ploso
229	Kelurahan Ringinanom	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/ringinanom
230	Kelurahan Werungotok	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/werungotok
231	Desa Balongpacul	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/balongpacul
232	Desa Kedungdowo	http://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kedungdowo
233	Kelurahan Guyangan	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
234	Kelurahan Kedondong	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
235	Desa Bagorkulon	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon

236	Desa Balongrejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
237	Desa Banarankulon	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
238	Desa Banaranwetan	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
239	Desa Buduran	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
240	Desa Gandu	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
241	Desa Gemenggeng	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
242	Desa Girirejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
243	Desa Karangtengah	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
244	Desa Kendalrejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
245	Desa Kerepkidul	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
246	Desa Kutorejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
247	Desa Ngumpul	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
248	Desa Paron	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
249	Desa Pesudukuh	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
250	Desa Petak	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
251	Desa Sekarputih	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
252	Desa Selorejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
253	Desa Sugihwaras	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon

JIAL telah menjadi rujukan masyarakat pencari informasi maupun wartawan media massa menerbitkan berita.

2) Website Electronic Procurement yaitu https://lpse.nganjukkab.go.id

c. Media sosial

Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk dan mengelola media sosial meliputi:

1) Fecebook dengan alamat https://www.facebook.com/dinas.kominfonganjuk.
2) Instagram dengan dengan alamat https://www.instagram.com/dinaskominfo_nganjuk
3) Youtube dengan alamat https://www.youtube.com/c/DiskominfoKabNganjuk

d. Media luar ruang

Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan media luar ruang, meliputi:

1) baliho sebanyak 20 (dua puluh) buah yang berada di seluruh kecamatan
2) Videotron sebanyak 2 (dua) unit di Pasar Lengkong dan di Jalan Gatot Subroto Nganjuk, yang dapat menampilkan konten informasi berbentuk video, gambar, chat, diagram atau konten visual lainnya
3) Mobil layanan informasi sebanyak 2 (dua) unit

2.2.3. Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selain dari APBD Kabupaten Nganjuk, juga berpotensi mendapat pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) dan APBN (melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).

2.2.4. Sumber Daya Jaringan Kerja

Perluasan jaringan kerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk secara formal ditempuh melalui:

1. Saluran vertikal, yaitu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI maupun dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur;
2. Kemitraan, yaitu dengan Lembaga Penyiaran Publik yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Kesenian Tradisional, Pewarta dan dunia usaha serta organisasi nirlaba yang bergerak di sektor komunikasi dan informatika;
3. Jejaring Informasi Anjuk Ladang, yaitu wadah bagi pengelola/ administrator media komunikasi 52 perangkat daerah, 264 desa, dan 20 kelurahan untuk bekerjasama melalui penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan perangkat daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode tahun sebelumnya.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Diskominfo Kabupaten Nganjuk

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Dinas Kominfo					Realisasi Capaian Tahun					Proyeksi Realisasi
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2022
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
1	Nilai Indeks SPBE	-	-	cukup (1,8 – < 2,6)	cukup (1,8 – < 2,6)	baik (2,6 – < 3,5)	baik (2,6 – < 3,5)	sangat baik (3,5 – < 4,2)	cukup (2,22)	baik (2,62)	Cukup (2.14)	-	-	baik (2,6 – < 3,5)
2	Persentase Aplikasi e-Government yang terhubung dengan jaringan	-	-	90%	90%	90%	-	-	92%	92%	94,05%	-	-	-
3	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	-	-	80%	85%	90%	-	-	100%	100%	71%	-	-	-
4	Presentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	98,85%	-	100%
5	Presentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	98%	-	100%
6	Presentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	13%	25%	-	-	-	7%	-	13%
7	Presentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala	-	-	-	-	-	60%	80%	-	-	-	100%	-	60%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pencapaian target pada kondisi (2021):

1. Sasaran yang realisasinya melampaui target: Persentase aplikasi e-Government yang terhubungan dengan jaringan (capaian 104,5%). Faktor yang berpengaruh:
   a. Meningkatnya jumlah aplikasi pada waktu pemberlakukan pembatasan sosial masa COVID-19;
   b. Adanya dukungan kebijakan yakni Program Unggulan Nganjuk Smart City pada RPJMD 2018-2023.

2. Sasaran yang realisasinya tidak mencapai target:
   a. Nilai Indeks SPBE (capaian 82%).
      Faktor yang berpengaruh:
      1) Kebijakan SPBE belum optimal, yakni: a) regulasi SPBE belum lengkap pengaturannya; b) belum berjalannya mekanisme evaluasi regulasi SPBE
      2) Tata Kelola SPBE belum optimal, yakni: a) belum memiliki rencana strategis SPBE yang terarah dan terukur; b) penganggaran SPBE pada APBD belum mengacu rencana strategis SPBE dan masih terpisah/tidak terintegrasi.
      3) Manajemen SPBE belum optimal, yakni: a) manajemen resiko, manajemen data, manajemen layanan SPBE; b) audit TIK; c) sumber daya manusia
      4) Layanan SPBE belum optimal, yakni: a) aplikasi aset; b) aplikasi kepegawaian; c) aplikasi pengawasan; d) aplikasi akuntabilitas; e) aplikasi JDIH; f) aplikasi data terbuka

   b. Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik (capaian 79%).
      Faktor yang berpengaruh:
      1) Rendahnya komitmen menerapkan keterbukaan informasi publik yang dipengaruhi adanya persepsi bahwa membuka informasi kepada publik akan menimbulkan sorotan masyarakat yang mempengaruhi kelancaran bekerja
      2) Keterbatasan sumber daya manusia PNS perangkat daerah dan pemerintah desa baik jumlah maupun kemampuan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai standar pelayanan informasi publik

Untuk Kondisi tahun 2022 dari 4 indikator sasaran terdapat 3 indikator yang tidak mencapai target yaitu :

1. Indikator Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Kabupaten Nganjuk realisasi sebesar 98,85% hal tersebut disebabkan salah satu aplikasi yaitu SMILE dari Dinas Kesehatan belum terintegrasi;
2. Indikator Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman realisasinya sebesar 98% hal tersebut di sebabkan salah satu Dinas yaitu Disporabudpar belum terlayani jaringan dari Diskominfo;

3. Indikator Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik realisasinya sebesar 7% kendala yang dihadapi masih rendahnya komitmen penerapan keterbukaan informasi publik serta minimnya kemampuan pengelolaan informasi publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik;

Data capaian kinerja sebagaimana tabel II.3.1 di atas diperoleh dari sumber :

1. Data Nilai indeks SPBE merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB terhadap semua instansi pusat dan Daerah;
2. Data Presentase aplikasi e-governmant yang terhubung dengan jaringan dan data Presentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi diperoleh dari Laporan Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian;
3. Data prosentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik diperoleh dari Laporan Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi publik.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	437.150.000	382.145.300	-	-	-	373.762.761	313.651.055	-	-	-	85,50	82,08	-	-	-	(55.004.700)	(60.111.706)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	629.642.500	509.189.500	-	-	-	608.127.369	415.330.903	-	-	-	96,58	81,57	-	-	-	(120.453.000)	(192.796.466)
Program peningkatan disiplin aparatur	4.800.000	920.000	-	-	-	4.800.000	900.000	-	-	-	100,00	97,83	-	-	-	(3.880.000)	(3.900.000)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.500.000	28.745.000	-	-	-	23.139.500	24.617.500	-	-	-	94,45	85,64	-	-	-	4.245.000	1.478.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.824.247.500	-	-	-	-	7.618.993.516	-	-	-	-	97,38	-	-	-	-	-	-
Program Penyebarluasan Informasi	951.250.000	-	-	-	-	789.107.339	-	-	-	-	82,95	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	240.700.000	150.000.000	-	-	-	183.924.250	135.632.750	-	-	-	76,41	-	-	-	-	(90.700.000)	(48.291.500)
Program penyelenggaraan pengamanan informasi	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Program pengelolaan aplikasi Informatika	-	5.932.077.000	-	-	-	-	5.078.977.431	-	-	-	-	85,62	-	-	-	-	-
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	1.208.583.000	-	-	-	-	947.307.800	-	-	-	-	78,38	-	-	-	-	-
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.975.461.431	6.231.349.144	-	-	-	4.476.032.747	5.560.182.822	-	-	-	74,91	89,23	-	(255.887.713)	(1.084.150.075)
Program informasi dan komunikasi publik	-	-	1.066.362.600	2.037.149.000	-	-	-	904.756.844	1.664.742.590	-	-	-	84,85	81,72	-	(970.786.400)	(759.985.746)
Program Aplikasi Informatika	-	-	2.590.644.461	5.553.196.601	-	-	-	2.452.737.200	5.363.754.767	-	-	-	94,68	96,59	-	(2.962.552.140)	(2.911.017.567)
Program penyelenggaraan statistik sektoral	-	-	263.200.000	119.959.000	-	-	-	7.480.000	99.649.500	-	-	-	2,84	83,07	-	143.241.000	(92.169.500)
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000	34.800.000	-	-	-	9.680.000	32.664.340	-	-	-	27,66	93,86	-	200.000	(22.984.340)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio antara anggaran dan realisasi rata-rata 90,47% di tahun 2019 kemudian 86,87% di tahun 2020 selanjutnya turun menjadi 57% di tahun 2021. Rasio realisasi Anggaran di tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan antara lain sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Untuk tahun 2022 keadaan daerah sudah kembali normal dari pandemi covid-19 sehingga capaian realisasi anggaran sudah meningkat menjadi rata-rata 88,89%.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Internal, yakni perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa.
2. Eksternal, yakni masyarakat umum, kelompok masyarakat, lembaga non pemerintah, instansi vertikal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dengan demikian, realisasi kinerja yang belum mencapai target pada periode perencanaan menjadi sumber rumusan permasalahan.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 9 Februari 2023 bertempat di Balai Desa Sidokare Kecamatan Rejoso, guna menjaring aspirasi masyarakat, yang menghasilkan rumusan permasalahan meliputi:

No	Peserta	Aspirasi
1.	Sekretaris Kecamatan Pace	Minimnya jumlah dan kualitas SDM TIK kecamatan dan desa
2.	Camat Rejoso	Kemampuan SDM PPID; perlunya infrastruktur CCTV kamtibmas; belum adanya branding wisata Semantok
3.	Pengurus Daerah Muhammadiyah Nganjuk	Belum mengetahui prosedur memperoleh data daerah
4.	Bank Jatim	Minimnya sosialisasi perilaku kebersihan di obyek wisata
5.	Politeknik Negeri Jember	Polije siap mendukung program digitalisasi melalui pendampingan
6.	JTV	Perlunya melakukan filter konten negatif pada media sosial; sulitnya akses informasi kepada pejabat pemerintah daerah; perlunya peningkatan peran media mainstream
7.	Dispendukcapil	Perlunya memperoleh sertifikat ISO agar dapat mengakses SIAK
8.	BPR Anjuk Ladang	Perlunya pelatihan pengelolaan media sosial dan website desa
9.	STKIP	Perlunya digital marketing
10.	Forum Anak	Dukungan Diskominfo kepada kegiatan Forum Anak agar tepat dilanjutkan
11.	Dinas Pendidikan	Perlunya infrastruktur jaringan internet bagi SD untuk kelancaran ANBK online; peningkatan SDM TIK
12.	TP PKK Kabupaten	Mohon difasilitasi aplikasi manajemen PKK
13.	Disporabudpar	Dukungan desa wisata

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika selama 4 tahun (2019-2022) serta aspirasi masyarakat dalam Forum Perangkat Daerah, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Lambatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik Data dukung: b. Capaian Indeks SPBE - **2022 2,18** - **2021 2,14** - **2020 2,62** - **2019 2,22** c. Capaian Indeks KAMI **2021 415**	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK Data dukung: - Persentase OPD terlayani jaringan fiber optik internet dedicated pada **2021: 36%** - Masih adanya daerah blank spot di Kabupaten Nganjuk 2. Terbatasnya jumlah dan mutu SDM TIK Data dukung: - Jumlah ASN Nganjuk kualifikasi TIK **2022 : 72 orang** 3. Dukungan kebijakan belum optimal - Perda SPBE: belum tersedia - Perda Keterbukaan Informasi Publik: **belum tersedia**	1. Penyediaan jaringan internet belum terintegrasi di Diskominfo Data dukung: - Anggaran internet pada 52 OPD R-APBD **2023: Rp. 5,3 Milyar** 2. Minimnya peluang pendidikan pelatihan TIK bagi ASN Data dukung: - Anggaran diklat TIK APBD **2022: belum tersedia** 3. Belum optimalnya pengelolaan data daerah Data dukung: - Tingkat kematangan kebijakan manajemen data 2021: **2 (dari optimal 5)** - Tingkat kematangan penerapan manajemen data 2021: **1 (dari optimal 5)** - Tingkat kematangan layanan data terbuka 2021: **1 (dari optimal 5)** 4. Masyarakat belum dapat mengakses informasi publik secara optimal Data dukung: - Predikat Keterbukaan Informasi Publik Kab. Nganjuk **2021: Kurang Informatif** 5. Penerapan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya optimal Data dukung: - Skor RB **2021: 72**

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah lambatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya manusia dan infrastuktur TIK. Selain itu, dukungan kebijakan penerapan SPBE belum optimal dalam hal ini belum adanya perda yang mengatur pelaksanaan SPBE. Hal-hal tersebut berdampak belum optimalnya pencapaian nilai indeks SPBE. Permasalahan yang lain adalah belum tersedianya jaringan komunikasi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk sehingga masih ada daerah blank spot atau susah sinyal.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah pengelolalaan data belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari capaian penilaian Indeks SPBE yang berkaitan dengan data.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai. Salah satu penyebabnya adalah peralatan persandian yang tersedia masih kurang. Penyebab lainnya adalah Kuantitas dan kesempatan pengembangan SDM yang terbatas.

Apabila ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

e. **Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Adapun Tujuan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek bisnis, masyarakat dan pemerintahan yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek yaitu bisnis, masyarakat dan pemerintahan yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital dan memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan pelayanan Dinas Kominfo berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan Informatika untuk Mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatand an pemerataan pembangunan.	1. Infrastruktur jaringan TIK yang belum memadai 2. Adanya kesenjangan Kemampuan TIKmasyarakat	1. Kebijakan daerah tentang layanan komunikasi dan informatika belum ada 2. Masih kurangnya Kompetensi SDM tentang pemanfaatan TIK. 3. Masih kurangnya Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas	1. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Adanya komitmen untuk mewujudkan smart Kabupaten
3. Tersedianya akses pitalebar nasional, Internet danpenyiaran digital yang merata dan Terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan	4. Infrastruktur jaringan TIK belum merata		
4. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	1. Implementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terselenggara		
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	1. Sistem aplikasi e-government belum terintegrasi		

f. **Telahaan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**

Adapun tujuan strategis BSSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.
2. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Tujuan Strategis BSSN yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan BSSN 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber Di Indonesia.
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Keamanan Siber Dan Sandi Yang Prima
3. terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sasaran strategis BSSN yang dapat di acu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.

Permasalahan pelayanan Dinas Kominfo berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Sasaran Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Strategis Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	Pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal	a. Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security) b. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta personil persandian	Kesadaran pentingnya keamanan informasi dan persandian

g. **Telahaan Badan Pusat Statistik (BPS)**

Adapun Tujuan Strategis BPS Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN,
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Tujuan Strategis BPS yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan BPS 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas;
2. Penguatan statistik sektoral;
3. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN;
4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Sasaran strategis BPS yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Permasalahan pelayanan Dinas Kominfo berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Pusat Statistik beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik

Sasaran Strategis Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya pemanfaatan data statistikyang berkualitas	Ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral belum optimal	a. Kurang maksimalnya ketersediaan Data umum pembangunan dan data spasial. b. Belum akuratnya data statistik	Adanya kebijakan satu data Indonesia dan kesadaran pentingnya data statistik sektoral

c. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Nganjuk dilakukan guna mengupayakan keterjangkauan dan ketersediaan informasi di seluruh wilayah Kabupaten dan mengusahakan pelayanan yang terintegrasi dan efisien. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041. Pengembangan sektor jaringan telekomunikasi diarahkan pada:

1. Penggunaan menara telekomunikasi bersama;
2. Pengembangan jaringan baru atau pengganti lama pada pusat sistem pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel, pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penyusunan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informasi selanjutnya memperhitungkan lingkungan strategis, juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, hasil telaah terhadap terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Pusat Statistik, dan Renstra Badan Sandi Negara, penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Nganjuk. Metode penentuan isu strategis dilakukan dengan metode Focus Group Discussion. Isu strategis pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kebutuhan infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan TIK dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi;
2. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi pemerintahan;
3. Kebutuhan yang tinggi atas data yang lengkap, valid dan mutakhir;
4. Menguatnya kebutuhan masyarakat terhadap keamanan informasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu beberapa tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah : **Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik.**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah: **Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal.**

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kab. Nganjuk

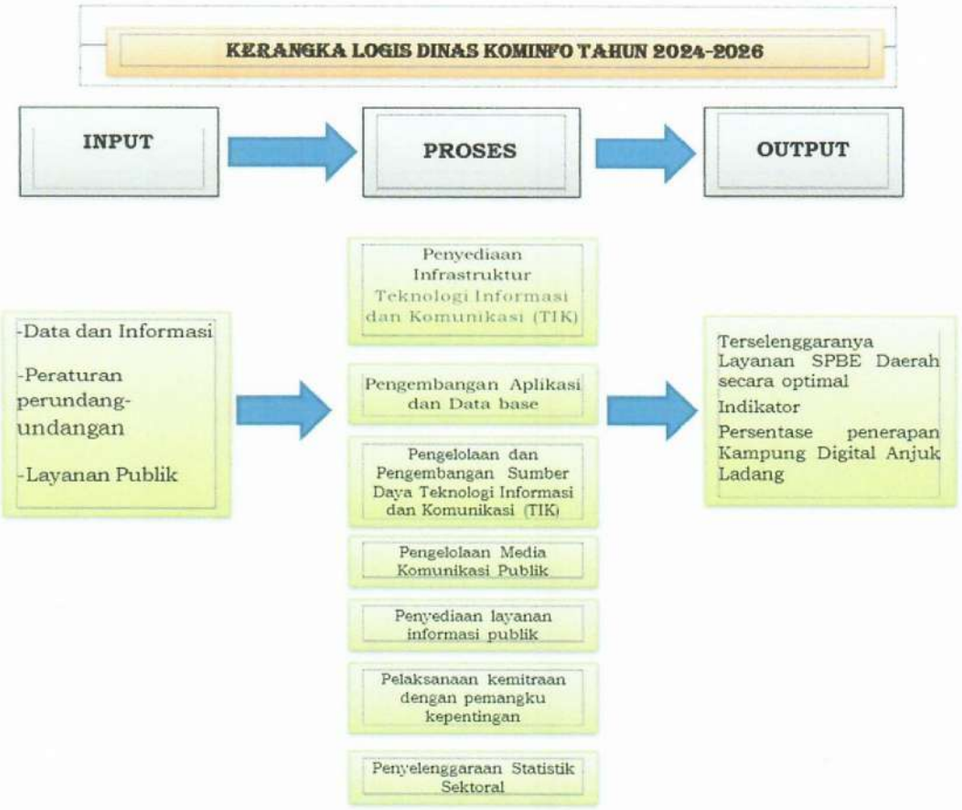
Tujuan	Sasaran	Indiktor Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target		
			2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5		
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik		Nilai Indeks SPBE	2,18	2,50	2,75	3,00
	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	N/a	7%	21%	42%

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perikanan		14/4/23
2.	Kabid Aptika		14/4/23
3.	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

4.2 Kerangka Logis, *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah serta Peta Proses Bisnis.

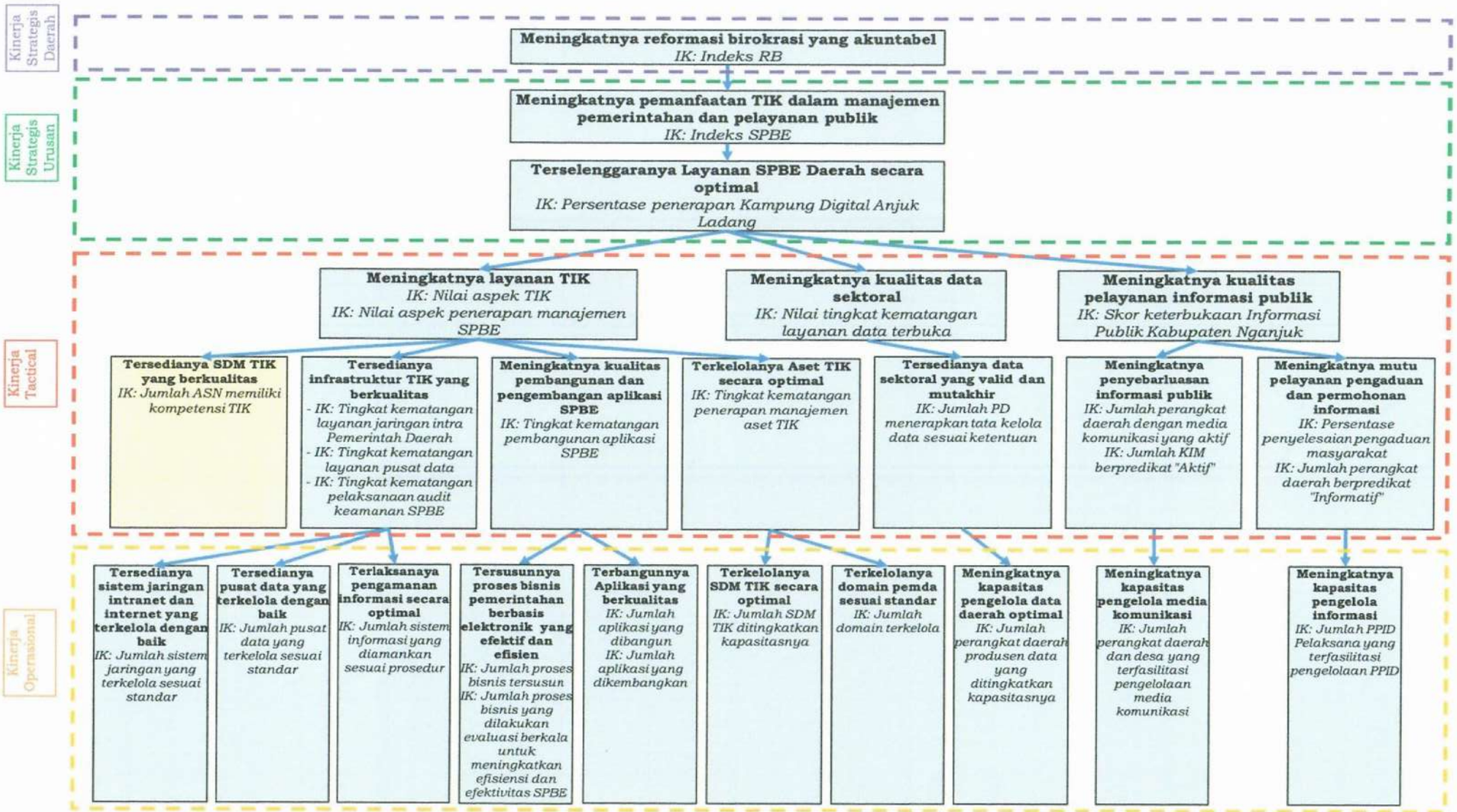
4.2.1.Kerangka Logis Dinas Kominfo Tahun 2024-2026.



4.2.2 Cascading Kinerja

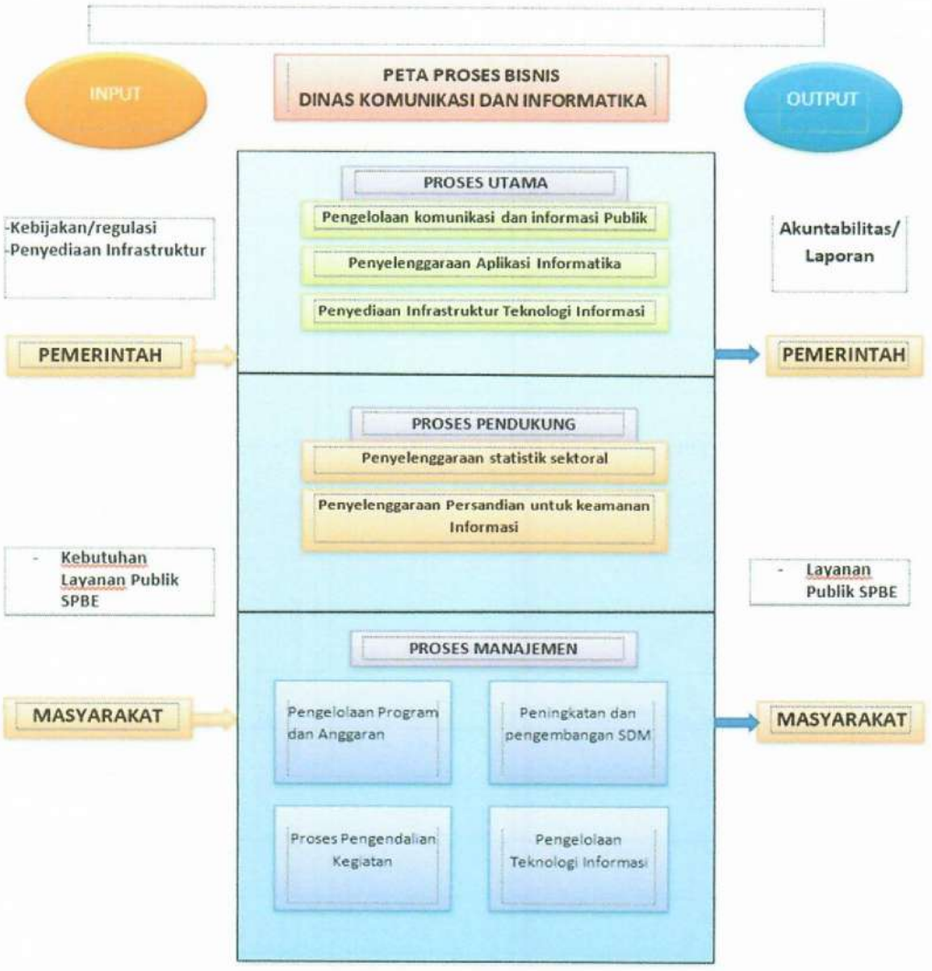
Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. NGANJUK



4.2.2 Peta Proses Bisnis

Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk



Proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Pada proses ini menekankan pada keterbukaan informasi pemerintahan kepada masyarakat (*open government*) guna mencegah korupsi serta membangun kepercayaan masyarakat (*trust*) agar diperoleh dukungan masyarakat (*participation*) untuk kelancaran pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika
   Proses ini menekankan pada pengelolaan aplikasi layanan SPBE baik internal dan eksternal, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

   Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Insfrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Proses pendukung dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Nganjuk terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

   Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, dengan tujuan menangkal kerentanan keamanan data dan informasi yang dapat mengganggu layanan manajemen pemerintahan dan layanan publik.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Proses ini bertujuan untuk membangun ketersediaan data yang lengkap, valid, mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa:

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana pada Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD :	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		
Sasaran RPD :	Meningkatnya transformasi digital pemerintahan daerah		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Menerapkan layanan SPBE yang terintegrasi dan aman, berbasis satu data yang valid dan dan mutakhir, didukung infrastruktur TIK dan SDM TIK yang berkualitas, serta mendayagunakan partisipasi masyarakat dalam wujud Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL)	Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya
			Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda
			Peningkatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda
			Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
			Peningkatan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan
			Peningkatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Teritegrasi
			Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda
			Peningkatan Layanan Infra Struktur Dasar data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
			Peningkatan Layanan Keamanan Informasi
			Peningkatkan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media
			Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik
			Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
			Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka keterbukaan Informasi Publik
			Peningkatan Pengumpulan, Pengolahanan, Analisa dan Desiminasi data Statistik Daerah

5.2 Proyek Prioritas Diskominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026.

Dalam rangka mendorong percepatan capaian tujuan dan sasaran, Dinas Kominfo menetapkan KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG (KAMPUNG DIAL) sebagai proyek Prioritas 2024-2026.

KAMPUNG DIAL adalah layanan terpadu dan berbasis elektronik di bidang pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.

Pembentukan KAMPUNG DIAL bertujuan untuk:

1. **Pelayanan Membahagiakan**, yakni menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpadu, berbasis elektronik sehingga membahagiakan masyarakat.
2. **Keluarga Sehat, Cerdas, dan Sejahtera**, yakni mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, cerdas, mandiri ekonomi, serta sigap melayani masyarakat rentan.
3. **Masyarakat Harmonis**, yakni menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terhindar dari konflik dan gangguan kamtibmas, serta keluarga yang tangguh dari bencana dan tangguh dari dampak buruk teknologi dan internet, mampu memanfaatkan teknologi dan internet untuk kesejahteraan keluarga.
4. **Pemerintahan Terpercaya**, yakni membangun pemerintahan desa dan kelurahan yang informatif (terbuka/ transparan dalam kebijakan), responsif (tanggap terhadap keluhan/ pengaduan masyarakat), serta profesional (berpengetahuan, tertib, dan produktif).
5. **Masyarakat Partisipatif**, yakni menciptakan desa/ kelurahan yang berkarakter gotong royong serta masyarakat yang aktif berpartisipasi mendukung kelancaran pembangunan desa/ kelurahan.

Rencana Pendanaan Indikatif Proyek Prioritas tercantum dalam tabel 6.2.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam Rencana Strategis tahun 2024-2026 urusan wajib komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   9. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   10. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   11. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   12. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
   13. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   14. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   15. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   16. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   17. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
   18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   19. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   20. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   21. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
   26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
   27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   28. Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

29. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
30. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
31. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
32. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;

b. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah.

33. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
34. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

35. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
36. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

37. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
38. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
39. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

40. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Gambaran Program/Kegiatan/SubKegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung disajikan pada tabel 6.1 sedangkan alokasi anggaran untuk proyek prioritas Dinas Kominfo pada tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 2024		Tahun ke-2 2025		Tahun ke-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1 Terselenggaranya layanan SPBE daerah yang optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL)	2 16 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat**	**80,44**	**81**	**6.420.592.550**	**82**	**6.517.313.942**	**83**	**5.967.700.000**	**83**	**18.905.606.492**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
					Nilai AKIP Perangkat Daerah	**78.15**	**81**		**86**		**91**		**91**			
			2 16 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**86 Dok**	**69 Dok**	**30.000.000**	**69 Dok**	**34.000.000**	**69 Dok**	**34.000.000**	**90 Dok**	**98.000.000**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
			2 16 01 2.01 01	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	6.000.000	4 Dok	10.000.000	4 Dok	10.000.000	9 Dok	26.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.01 02	b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37 Dok	30 Dok	10.000.000	30 Dok	10.000.000	30 Dok	10.000.000	90 Dok	30.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.01 03	c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35 Dok	30 Dok	10.000.000	30 Dok	10.000.000	30 Dok	10.000.000	90 Dok	30.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.01 06	d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	6 Laporan	4.000.000	6 Laporan	4.000.000	6 Laporan	4.000.000	18 Laporan	12.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.02	**Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun**	**66 Dok**	**63 Dok**	**3.523.000.000**	**63 Dok**	**3.523.500.000**	**63 Dok**	**3.879.000.000**	**189 Dok**	**10.925.500.000**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
			2 16 01 2.02 01	a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	22 ASN	3.500.000.000	22 ASN	3.500.000.000	24 ASN	3.855.000.000	24 Orang	10.855.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.02 03	b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dok	45 Dok	15.000.000	45 Dok	15.000.000	45 Dok	15.000.000	135 Dok	45.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo

OKDINASI

	Paraf	Tgl.
Kabid Perudda		14/4 23
Kabid Aptika		14/4'23
Kabid P3M		14/4-23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 16 01 2.02 05	c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	3 lap	15.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.02 07	d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Lap	13 Lap	3.000.000	13 Lap	3.500.000	13 Lap	4.000.000	39 lap	10.500.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**20 Dok**	**25 Dok**	**515.000.000**	**25 Dok**	**509.000.000**	**25 Dok**	**518.000.000**	**65 Dok**	**1.542.000.000**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
			2 16 01 2.05 02	b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	24 paket	7.000.000	-	-	24 paket	8.000.000	24 paket	15.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.05 09	a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	8.000.000	20 Orang	9.000.000	20 Orang	10.000.000	20 Orang	27.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.05 10	c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	1500 Orang	1.500.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**12 laporan**	**12 laporan**	**428.092.550**	**12 laporan**	**428.813.942**	**12 laporan**	**429.200.000**	**36 laporan**	**1.286.106.492**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
			2 16 01 2.06 01	a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	18.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.06 02	b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	150.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.06 03	c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	1 Paket	2.000.000	-	-	-	-	1 Paket	2.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo

PARAF KOORDINASI

Jabatan	Paraf	Tgl.
Kabid Renbidan		14/4 23
Kabid Aptika		14/4 23
PSM		14/4 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 16 01 2.06 04	d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	90.000.000	4 Paket	91.413.942	4 Paket	92.000.000	4 Paket	273.413.942	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.06 05	e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 paket	16.000.000	2 paket	16.200.000	2 paket	16.000.000	2 paket	48.200.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.06 06	f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	912 dok	912 dok	7.000.000	912 dok	8.000.000	912 dok	8.000.000	2736 Dok	23.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.06 09	g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	30 Lap	250.000.000	30 Lap	250.000.000	30 Lap	250.000.000	60 lap	750.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.06 10	h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 dok	300 dok	7.092.550	300 dok	7.200.000	300 dok	7.200.000	900 dok	21.492.550	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**27 Buah**	**26 buah**	**1.150.000.000**	**26 buah**	**1.195.000.000**	**57 buah**	**200.000.000**	**121 buah**	**2.545.000.000**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
			2 16 01 2.07 01	a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	NA	2 unit	1.000.000.000	2 unit	1.000.000.000	-	-	1 unit	2.000.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.07 06	b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	15 unit	150.000.000	15 unit	195.000.000	15 unit	200.000.000	15 unit	545.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**8 Jasa**	**4 jasa**	**476.500.000**	**4 jasa**	**532.000.000**	**4 jasa**	**587.000.000**	**4 jasa**	**1.595.500.000**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
			2 16 01 2.08 01	a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	4 Laporan	1.500.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	5.500.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.08 02	b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	1.350.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.08 04	c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NA	12 laporan	75.000.000	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	2 laporan	240.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo

PARAF KOORDINASI

No.	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendaftaran	14/4 23
2.	Kasubid Aptika,	14/4 23
3.	Kabid P3M	14/4 23
4.		
5.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 16 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**37 Unit**	**42 unit**	**298.000.000**	**42 unit**	**295.000.000**	**42 unit**	**320.500.000**	**62 unit**	**913.500.000**	**Sekretariat Diskominfo**	**Kantor Dinas Kominfo**
			2 16 01 2.09 02	a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	175.000.000	10 unit	180.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	555.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.09 05	b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	5 unit	10.000.000	-	-	5 unit	5.000.000	5 unit	15.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.09 06	c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 Unit	25 unit	13.000.000	25 unit	15.000.000	25 unit	15.500.000	25 unit	43.500.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 01 2.09 09	d) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	300.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kantor Dinas Kominfo
			02 16 02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**	****51,18**	**60**	**2.180.000.000**	**80**	**2.297.000.000**	**90**	**2.503.000.000**	**90**	**6.980.000.000**	**Bidang Statistik dan PIKP**	**Se-Kabupaten Nganjuk**
			02 16 02 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota**	**Jumlah perangkat daerah berpredikat "Informatif"**	**1**	**3**	**2.180.000.000**	**5**	**2.297.000.000**	**10**	**2.503.000.000**	**10**	**6.980.000.000**	**Bidang Statistik dan PIKP**	**Se-Kabupaten Nganjuk**
					- Jumlah KIM berpredikat "Aktif"	**3 KIM**	**5 KIM**		**10 KIM**		**15 KIM**		**15 KIM**			
					- Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif	**3 PD**	**10 PD**		**25 PD**		**52 PD**		**52 PD**			
					- Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
			02 16 02 2.01 05	a) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	N/A	1 Dok	2.000.000.000	1 Dok	2.100.000.000	1 Dok	2.300.000.000	3 Dok	6.400.000.000	Bidang Statistik dan PIKP	Se-Kabupaten Nganjuk
			02 16 02 2.01 06	b) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	N/A	1 Dok	80.000.000	1 Dok	82.000.000	1 Dok	83.000.000	3 Dok	245.000.000	Bidang Statistik dan PIKP	Se-Kabupaten Nganjuk
			02 16 02 2.01 08	c) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	N/A	1 Dok	100.000.000	1 Dok	115.000.000	1 Dok	120.000.000	3 Dok	335.000.000	Bidang Statistik dan PIKP	Se-Kabupaten Nganjuk

PARAF KOORDINASI

Pejabat	Paraf	Tgl.
Kabid Kendali		14/4 23
Kabid Aptika		14/4 23
Kabid P3M		14/4 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 16 03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Nilai aspek TIK**	**1,75**	**2,00**	**16.300.000.000**	**2,50**	**17.900.000.000**	**3,50**	**21.600.000.000**	**3,50**	**55.800.000.000**	**Bid. Aptika dan Persandian**	**Se-Kabupaten Nganjuk**
			2 16 03 2 02	**Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE**	**1**	**2**	**6.500.000.000**	**3**	**7.850.000.000**	**3**	**9.050.000.000**	**3**	**23.400.000.000**	**Bid. Aptika dan Persandian**	**Se-Kabupaten Nganjuk**
					Tingkat kematangan layanan pusat data	**1**	**2**		**3**		**3**		**3**			
					Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	**1**	**2**		**3**		**3**		**3**			
			2 16 03 2 02 03	a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.250.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	3.750.000.000	Bid. Aptika dan Persandian	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 03 2 02 07	b) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	4 Unit	400.000.000	4 Unit	600.000.000	4 Unit	800.000.000	12 Unit	1.800.000.000	Bid. Aptika dan Persandian	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 03 2 02 09	d) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	NA	1 Dok	800.000.000	1 Dok	1.500.000.000	1 Dok	2.000.000.000	3 Dok	4.300.000.000	Bid. Aptika dan Persandian	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 03 2 02 10	c) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	NA	1 Dok	4.300.000.000	1 Dok	4.500.000.000	1 Dok	4.750.000.000	3 Dok	13.550.000.000	Bid. Aptika dan Persandian	Kantor Dinas Kominfo
			2 16 03 2 01	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah**	**Nilai Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah**	**3**	**3**	**9.800.000.000**	**3**	**10.050.000.000**	**4**	**12.550.000.000**	**4**	**32.400.000.000**	**Bid. Aptika dan Persandian**	**Se-Kabupaten Nganjuk**
			2 16 03 2 01 02	a) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokumen	150.000.000	Bid. Aptika dan Persandian	Se-Kabupaten Nganjuk
			2 16 03 2 01 03	b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	1 unit	9.750.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	12.500.000.000	1 unit	32.250.000.000	Bid. Aptika dan Persandian	Kantor Dinas Kominfo

PARAF KOORDINASI

Pejabat	Paraf	Tgl
Kabid Rendalak		14/4 23
Kabid Aptika		14/4 23
Kabid PSM		14/4 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			02 20 02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**	**1**	**2**	**500.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**700.000.000**	**3**	**1.800.000.000**	**Bid statistik dan PIKP**	**Diskominfo Kab. Nganjuk**
			02 20 02 2.01	**Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota**	**Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan**	**1 Buku**	**1 Buku**	**500.000.000**	**1 Buku**	**600.000.000**	**1 Buku**	**700.000.000**	**3 Buku**	**1.800.000.000**	**Bid statistik dan PIKP**	**Diskominfo Kab. Nganjuk**
			02 20 02 2.01 01	a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	NA	1 dok	500.000.000	1 dok	600.000.000	1 dok	700.000.000	3 dok	1.800.000.000	Bidang Statistik dan PIKP	Diskominfo Kab. Nganjuk
			02 21 02	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**86%**	**87%**	**700.000.000**	**88%**	**350.000.000**	**89%**	**400.000.000**	**89%**	**1.450.000.000**	**Bid. Aptika dan Persandian**	**Se-Kabupaten Nganjuk**
			02 21 02 2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE**	**1**	**2**	**700.000.000**	**2**	**350.000.000**	**3**	**400.000.000**	**3**	**1.450.000.000**	**Bid. Aptika dan Persandian**	**Se-Kabupaten Nganjuk**
			02 21 02 2.01 03	a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	NA	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	400.000.000	36 Laporan	1.450.000.000	Bid. Aptika dan Persandian	Se-Kabupaten Nganjuk
				JUMLAH				**26.100.592.550**		**27.664.313.942**		**31.170.700.000**		**84.935.606.492**		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Renbang		14/4 23
2.	Kabid Aptika		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

Tabel 6.2

Rencana Pendanaan Indikatif Proyek Prioritas dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Proyek Prioritas	Indikator Proyek	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja proyek dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun ke-1 2024		Tahun ke-2 2025		Tahun ke-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Kampung Digital Anjuk Ladang (Kampung Dial)	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksananakan Kampung Dial	N/A	20 Desa/Kel	800.000.000	60 Desa/kel	1.500.000.000	120 Desa/kel	2.000.000.000	120 desa/kel	4.300.000.000	Diskominfo	Desa/ kelurahan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL)	Hasil evaluasi KAMPUNG DIAL	N/A	7%	21%	42%	42%

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai aspek TIK	Hasil Penilaian Indeks SPBE	1,75	2,00	2,50	3,50	3,50
2.	Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	Hasil Penilaian Indeks SPBE	1	2	3	3	3
3.	Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	Hasil SAQ evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	*51,18	60	80	90	90

Note : * data awal Tahun 2021

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001